

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan *developing country* dan tengah mengalami banyak sekali tantangan dalam beberapa sektor, terutama perihal ekonomi. Meskipun berbagai cara dicoba untuk merangsang *growth of economics*, namun kenyataannya masih terdapat beragam permasalahan yang belum terselesaikan, terutama dalam lingkup ekonomi masyarakat. Kondisi ini telah menjadi dasar bagi masyarakat untuk bersatu dalam berbagai organisasi guna mengatasi masalah tersebut. Salah satu bentuk respons dari masyarakat adalah melalui berbagai bentuk organisasi, di antaranya adalah organisasi sosial yang biasa disebut sebagai organisasi non laba.

Organisasi non laba, atau yang sering dikenal dengan sebutan organisasi non profit, memiliki tujuan utama mendorong suatu fenomena atau hal-hal tertentu guna membuat public memperhatikan dan menggapai tujuan non-komersil. Dalam konteks ini, organisasi ini tidak fokus pada keuntungan finansial, melainkan lebih kepada tujuan yang lebih luas dan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. [1] Seringkali terdapat kesulitan dalam memisahkan antara organisasi non laba dan *business organization* karena kesamaan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Namun, pada dasarnya terdapat perbedaan signifikan antara organisasi non laba dan *business organization*. Hal yang berbeda paling terlihat pada mekanisme kedua jenis organisasi tersebut memperoleh *resource* yang diperlukan guna menjalankan berbagai *operating*

activity mereka. Salah satu ciri khas yang memisahkan organisasi non laba dari organisasi bisnis adalah bagaimana mereka memperoleh dan mengelola sumber daya.

Organisasi non laba memiliki perbedaan yang mencolok dari organisasi bisnis dalam hal cara mendapatkan serta mengelola sumber daya. *Resource* yang didapati organisasi non laba berasal dari donator dengan tidak memiliki *business purpose* (tanpa menghasilkan laba)[2]. Organisasi non laba mendapatkan *donor resource* yang diberikan oleh keanggotaan dan kontribuss pihak lainnya tanpa mengharapkan sepeserpun *feedbacck* dari pihak-pihak tersebut. Kontribusi ini diberikan atas dasar hasil daripada layanan yang diberikan oleh organisasi. Disamping mengandalkan *supply* dari para pemberi sumbangan guna memenuhi *resource needs*, organisasi non laba juga mengamankan modal melalui pinjaman dan dana operasional berasal dari pendapatan yang dihasilkan melalui layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Karena hal tersebutlah, *measurement of count, time, dan income of cash flow* menjadi parameter kinerja yang cukup vital bagi pihak yang menggunakan *financial statement* organisasi non laba.

Dalam *financial statement*, organisasi non laba memiliki perbedaan signifikan dengan *business organizations financial statement* pada umumnya. Perbedaan utamaa terletak bagaimana organisasi mendapatkan *resiurce* yang diperlukan guna menjalankan operasionalnya. [3] Dalam konteks akuntansi, penyusunan sistem pencatatan didasarkan pada prinsip tujuan kebenaran, kepastian, transparansi, dan keadilan untuk melibatkan lebih dari satu pihak sebagai alat pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban ini ditujukan baik kepada pelaksana (pihak yang bertanggung jawab) dalam pemenuhan kewajiban mereka maupun kepada pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan(*foundation*) didefinisikan sebagai sebuah badan yang berlandaskan hukum yang memiliki aset terpisah guna mencapai tujuan yang bersifat *social, religion*, dan *humanity*. Undang-Undang ini mengatur tentang yayasan. Sebagai organisasi, yayasan mengumpulkan dana melalui donasi dan sumbangan dari anggota dan donatur dengan tidak memiliki harapan atas *feedback* dari pihak penyumbang. Dana yang diperoleh direkam dalam bentuk pertanggungjawaban yang termanifestasi sebagai laporan keuangan. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, khususnya pada pasal 52 ayat (5) yang mengamanatkan "*financial statement* organisasi wajib dirangkai dengan dasar Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku." Namun, pada kenyataannya, banyak yayasan di Indonesia sekarang kurang mengacu pada sistem pengelolaan dan penyusunan *financial statement*, lebih mengutamakan pelaksanaan kegiatan dan program-program yang dijalankan[4]. *Financial statement* mengambil peran yang cukup diperhatikan bagi yayasan.

Financial statement berfungsi sebagai alat dalam mempertanggungjawabkan *resource management* yang diamanahkan kepada pihak manajemen yayasan. Selain itu, *financial statement* juga berperan dalam instrumen *control and evaluation* terhadap *managerial perform* suatu organisasi. Pemenuhan kriteria dasar ditentukan dalam Kualitas *financial statement* dalam pemberian suatu informasi bersifat relevan dan

kredibel. *Financial management* yang baik pada suatu yayasan mencerminkan adanya kepengurusan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Selain pertanggungjawaban, transparansi juga memiliki peranan penting dalam menjalankan operasional yayasan. Secara definisi, transparansi berarti adanya keterbukaan. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keterbukaan kepada masyarakat dalam menyajikan informasi terkait seluruh kegiatan yayasan. Prinsip transparansi ini dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan berdampak positif pada kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh yayasan.

Saat ini, organisasi non laba di Indonesia umumnya lebih fokus pada kualitas program-program yang dijalankan dan kurang memberikan perhatian pada penyajian *financial statement*. Namun, pada sisi *practical, financial management system* yang efisien jadi pokok indicator dalam akuntabilitas serta transparansi dalam suatu lembaga. Penting untuk diingat bahwa *financial management system* yang baik dapat memberikan peningkatan pada akuntabilitas dan transparansi yayasan. Sebagai contoh, dalam konteks masjid sebagai organisasi nirlaba, penting bagi mereka untuk memberikan laporan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini karena masjid mengandalkan sumbangan, sedekah, dan bantuan sosial lainnya untuk berkembang. Oleh karena itu, masjid harus terbuka terhadap masyarakat umum dengan memberikan informasi dengan sifat akurat, jujur, dan tidak bersifat diskriminatif, terutama kepada keanggotaan di dalam keagamaan yang dinaungi. Informasi ini harus bisa diakses kepada siapapun melalui tahapan yang sesuai, dengan demikian tidak dapat

dinabfaatkan dalam hal negatif oleh pihak yang memiliki niat tidak baik terhadap organisasi[5].

[6] *Financial statement* pada organisasi non laba mencakup beberapa jenis laporan, termasuk *balance sheet* pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan dalam aset neto, laporan arus kas yang mencakup periode pelaporan tertentu, serta catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut. Untuk mendukung *operating and economic activities*, Ponok Pesantren Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghasilkan panduan akuntansi.

Tujuan dari kerjasama ini adalah dengan tujuan Pondok Pesantren bisa merangkai *financial statement* yang terstruktur juga bersandar pada standar[7]. Saat ini, *financial statements management* yang dirangkaikan yayasan masih melakukannya secara tradisional dan belum mengikuti pedoman baku yang berlaku. Format *financial statement* yang digunakan sangatlah sederhana, sekadar mencatat transaksi keluar maupun masuk dengan hasil berupa saldo akhir. Proses pelaporan dan pengelolaan keuangan di sekarang masih belum menerapkan pedoman ISAK 35[8]. Sejalan dengan pertumbuhan pesantren di Indonesia yang semakin maju, pentingnya perangkaian *financial statement* yang tepat dan berdasar dengan standar telah menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia maupun Ikatan Akuntan Indonesia. Sejak periode 2018, pedoman akuntansi khusus untuk pesantren telah diterbitkan, yang didasarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

(PSAK 45). Pada akhir tahun 2019, revisi dari PSAK 45 yaitu ISAK 35 dikeluarkan, mengakibatkan beberapa perubahan yang perlu disesuaikan dengan pedoman akuntansi yang telah ada. Perangkaian *financial statement* yayasan atau organisasi non laba di Indonesia didasari oleh aturan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Penggunaan standar ISAK 35 diharapkan dapat menciptakan konsistensi dalam perangkaian *financial statement* yayasan di Indonesia. Pada lain hal, penggunaan standar ISAK 35 meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan. Hal ini memungkinkan pihak tersebut dalam melihat berbagai macam aktivitas maupun kegiatan yang sudah dijalani organisasi tersebut, serta melihat bagaimana penggunaan anggaran sebagai bukti atas pertanggungjawaban terhadap dana yang diterima dengan sumber para donatur.

Selama periode waktu yang telah berlalu, banyak kalangan yang berpendapat bahwa salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam lembaga pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren, adalah dalam hal manajemen[9]. Oleh karena itu, agar mendapatkan efisiensi *financial management* dan mengurangi kelemahan dalam yayasan, terutama dalam yayasan lembaga pendidikan Islam yang bersifat non laba, sangat penting untuk memiliki pemahaman mengenai cara merangkai *financial management* organisasi berdasar dengan pemberlakuan regulasi saat ini. Proses perangkaian *financial statement* di yayasan atau lembaga pendidikan saat ini mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35)[10]. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang berkaitan dengan perangkaian *financial statement* memiliki focus dan tujuan nonlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 11 April 2019. Standar ini menggantikan PSAK 45 yang sebelumnya berkaitan dengan *financial statement* organisasi nirlaba. Dalam PSAK 45, "Not-For-Profit" dimaknai sebagai "nirlaba", namun melalui ISAK 35, DSAK IAI mengganti istilah tersebut menjadi "nonlaba". Perubahan ini dilakukan berdasarkan sifat utama entitas tersebut yang tidak berfokus pada usaha mencari laba atau keuntungan.

[11] *resource* pesantren merupakan bagian dari elemen yang memiliki andil besar dalam menentukan *development* pondok pesantren. Resource pesantren terdiri atas tiga komponen utama, antara lain *human resource*, *capital resource*, dan *facility resource*. Ketiga unsur ini menjadi inti dalam perjalanan pesantren. Jenis *resource* maupun asset dikelola pondok pesantren, seperti asset tetap maupun lainnya, memiliki sumber dari berbagai hal seperti sumbangan, SPP, pendapatan dari perusahaan yang dimiliki, yang memiliki sumber pokok adalah dari wakaf. Wakaf memiliki peranan kunci daripada *education financeing* dengan tujuan memberikan peningkatan pada kualitas sektor Pendidikan pada pesantren. Oleh sebab itulah, pesantren memerlukan suatu sistem akuntansi maupun *financial statement* yang mampu memberikan *financial information* yang akurat. Ini juga akan membantu meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap yayasan yang terkait. Sebagai sebuah entitas yang bukan berorientasi pada profit, pelaporan kekayaan maupun labilitas pondok pesantren wajib diberikan perbedaan dengan kekayaan dan liabilitas dari entitas lain, baik itu organisasi maupun individu.[11]

Penelitian ini mencoba mengimplementasikan perangkaian *financial statement* organisasi nirlaba berdasarkan ISAK 35 pada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqin Kab. Mojokerto. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqin Kab. Mojokerto merupakan organisasi non laba pendidikan agama islam yang berada di Kec. Gedeg Kab. Mojokerto. Dalam perkembangannya, Yayasan ini mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan berbasis ISAK 35 organisasi non laba. Hal tersebut diakibatkan karena ketidakpahaman pengelola terkait tata cara perangkaian *financial statement* pada organisasi non laba. Hingga sampai sekarang, praktik perangkaian *financial statement* yang dilakukan pihak pengelola yayasan masih belum sesuai pada standar ISAK 35. Penyusunan laporan keuangan hanya sebatas pada laporan masuk dan keluarnya dana saja. Walau selama ini *financial statement* pada yayasan tersusun dengan rapi dan baik, namun pemahaman terkait isi laporan keuangan hanya dipahami oleh pihak pengelola perusahaan. Sehingga keadilan data pada laporan keuangan masih terbilang kurang valid dan rentan penyalahgunaan.

Mengingat bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk atas segala pertanggung-jawaban dari pihak pengelola yayasan kepada Masyarakat sipil maupun pemerintah, maka *financial statement pada* yayasan harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dengan nilai tinggimaka dari itu,, perangkaian *financial statement* untuk organisasi non laba harus dilakukan sesuai berdasar pada standar berlaku umum, seperti ISAK 35 yang menjadi standar pelaporan keuangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan proses perangkaian *financial statement* Yayasan

Pendidikan Roudhotul Muttaqin berdasarkan standard dalam pelaporan keuangan yang berlaku, yaitu ISAK 35.

1.2 Fokus Penelitian

Tujuan dari fokus penelitian ini adalah untuk mempersempit lingkup studi kualitatif dan selektif dalam pemilihan data yang relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini berdasarkan pada urgensi masalah yang sedang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada "Analisis Perbandingan penyusunan laporan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Muttaqin dengan ISAK 35 dan Pedoman Akuntansi Pesantren". Objek utama dari penelitian ini adalah coffee shop yang berada dalam Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Muttaqin, yang terletak di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

1.3 Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang dari rumusan masalah yang disusun oleh peneliti, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqin?
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqin sesuai dengan ISAK 35 dan pedoman akuntansi pesantren?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqin.
2. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqin sesuai dengan ISAK 35 dan pedoman akuntansi pesantren.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga pada pengetahuan di bidang ini, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 untuk organisasi nirlaba dan pedoman akuntansi pesantren.
 - b. Temuan dari penelitian ini bisa menjadi acuan, perbandingan, dan sumber pengembangan bagi penelitian mendatang.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Yayasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan di periode selanjutnya, terutama berkaitan pada laporan keuangan sektor non laba yayasan pondok pesantren.